



2.1 GAMBARAN UMUM KABUPATEN JEPARA

2.1.1 Profil Geografi

Secara geografis Kabupaten Jepara terletak pada posisi 110° 9' 48, 02" sampai 110° 58' 37,40" Bujur Timur, 5° 43' 20,67" sampai 6° 47' 25,83" Lintang Selatan, sehingga merupakan daerah paling ujung sebelah utara dari Provinsi Jawa Tengah. Berdasar letak geografis wilayah, maka Kabupaten Jepara beriklim tropis dengan pergantian musim penghujan dan kemarau. Musim penghujan antara bulan Nopember-April dipengaruhi oleh musim Barat sedang musim kemarau antara bulan Mei-Oktober yang dipengaruhi oleh angin musim Timur. Sedangkan jumlah curah hujan ± 2.464 mm, dengan jumlah hari hujan 89 hari. Suhu udara Kabupaten Jepara terendah pada 21,55 °C dan tertinggi sekitar 33,71 °C, dengan kelembaban udara rata-rata sekitar 84%.

Kabupaten Jepara merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang beribukota di Jepara, dengan jarak tempuh ke Ibukota Provinsi sekitar 71 km dan dapat ditempuh dengan kendaraan lebih kurang 2 jam. Kabupaten ini berbatasan dengan Laut Jawa di Barat dan Utara, Kabupaten Pati dan Kabupaten Kudus di Timur, serta Kabupaten Demak di Selatan. Wilayah Kabupaten Jepara juga meliputi Kepulauan Karimunjawa, yang berada di Laut Jawa, dimana untuk menuju ke wilayah tersebut sekarang dilayani oleh kapal *ferry* dari Pelabuhan Jepara dan kapal cepat dari Pelabuhan Tanjung Emas Semarang. Selain itu di Kepulauan Karimunjawa juga terdapat lapangan terbang perintis yang dapat didarati pesawat terbang berjenis kecil dari Semarang.

Luas wilayah daratan Kabupaten Jepara 1.004,132 km² dengan panjang garis pantai 72 km. Wilayah tersempit adalah Kecamatan Kalinyamatan (24,179 km²) sedangkan wilayah terluas adalah Kecamatan Keling (231,758 km²). Sebagian besar luas wilayah merupakan tanah kering, sebesar 740,052 km² (73,70%) sisanya merupakan tanah sawah, sebesar 264,080 km² (26,30%).



Gambar 2.1
Letak Kabupaten Jepara dalam Konstalasi Jawa Tengah

Dari wilayah Kabupaten Jepara juga mencakup luas lautan sebesar 1.845,6 km². Pada lautan tersebut terdapat daratan kepulauan sejumlah 29 pulau, dengan 5 pulau berpenghuni dan 24 pulau tidak berpenghuni. Wilayah kepulauan tersebut merupakan Kecamatan Karimunjawa yang berada di gugusan Kepulauan Karimunjawa, yakni gugusan pulau-pulau yang ada di Laut Jawa dengan dua pulau terbesarnya adalah Pulau Karimunjawa dan Pulau Kemujan. Sedangkan sebagian besar wilayah perairan tersebut dilindungi dalam Cagar Alam Laut Karimunjawa.



Gambar 2.2
Peta Administrasi Kabupaten Jepara

Adapun batas-batas wilayah administratif kabupaten Jepara adalah sebagai berikut :

- Sebelah Barat : Laut Jawa
- Sebelah Timur : Kabupaten Kudus dan Kabupaten Pati
- Sebelah Utara : Laut Jawa
- Sebelah Selatan : Kabupaten Demak

Secara administratif wilayah seluas 1.004,132 km² tersebut terdiri atas 16 kecamatan yang dibagi lagi atas sejumlah 183 desa dan 11 kelurahan, seperti terlihat dalam tabel berikut.

Tabel 2.1
Jumlah Kecamatan, Luas, Desa/Kelurahan, RW dan RT

No.	Kecamatan	Luas (km2)	Desa/Kel	RW	RT
1.	Jepara	24,667	16	84	305
2.	Bangsri	85,352	12	120	434
3.	Batealit	88,879	11	51	283
4.	Donorejo	108,462	8	54	252
5.	Kalinyamatan	23,700	12	51	257
6.	Karimunjawa	71.200	3	14	53
7.	Kedung	43,063	18	63	257
8.	Keling	123,116	12	68	332
9.	Kembang	108,124	11	78	331
10.	Mayong	65,043	18	75	387
11.	Mlonggo	42,402	8	51	278
12.	Nalumsari	56,965	15	78	365
13.	Pecangaan	35,878	12	84	340
14.	Pakis Aji	60,553	8	51	263
15.	Tahunan	38,906	15	75	311
16.	Welahan	27,642	15	44	217
	Jumlah	1.004,132	194	1.041	4.665

Sumber: Jepara Dalam Angka Tahun 2011

Secara topografi Kabupaten Jepara dapat dibagi dalam empat wilayah yaitu wilayah pantai di bagian pesisir Barat dan Utara, wilayah dataran rendah di bagian tengah dan Selatan, wilayah pegunungan di bagian Timur yang merupakan lereng Barat dari Gunung Muria dan wilayah perairan atau kepulauan di bagian utara merupakan serangkaian Kepulauan Karimunjawa.

Tabel 2.2
Ketinggian Permukaan Tanah Kecamatan

No	Kecamatan	Ketinggian (mdpl)
1.	Jepara	0 – 46
2.	Bangsri	0 – 594
3.	Batealit	68 – 378
4.	Donorejo	0 – 619
5.	Kalinyamatan	2 – 29
6.	Karimunjawa	0 – 100
7.	Kedung	0 – 2
8.	Keling	0 – 1.301
9.	Kembang	0 – 1.000
10.	Mayong	13 – 438
11.	Mlonggo	0 – 300
12.	Nalumsari	13 – 736
13.	Pecangaan	2 – 17
14.	Pakis Aji	25 – 1.000
15.	Tahunan	0 – 46
16.	Welahan	2 – 7

Sumber: Jepara Dalam Angka Tahun 2011

Dengan kondisi topografi demikian, Kabupaten Jepara memiliki variasi ketinggian antara 0 m sampai dengan 1.301 m dpl (dari permukaan laut), daerah terendah adalah Kecamatan Kedung antara 0 - 2 mdpl yang merupakan dataran pantai, sedangkan daerah yang tertinggi adalah Kecamatan Keling antara 0-1.301 mdpl merupakan perbukitan. Variasi ketinggian tersebut menyebabkan Kabupaten Jepara terbagi dalam empat kemiringan lahan, yaitu datar 41.327,060 Ha, bergelombang 37.689,917 Ha, curam 10.776 Ha dan sangat curam 10.620,212 Ha.

Berdasar data tersebut di atas, bagian daratan utama Kabupaten Jepara terdiri dari dataran rendah dan dataran tinggi yang merupakan kawasan pada lereng Gunung Muria. Kondisi ini menyebabkan sistem hidrologinya mengalir beberapa sungai besar yang memiliki beberapa anak sungai. Dimana karakteristik kontur wilayah, menyebabkan sungai mengalir dari daerah hulu di bagian timur dan selatan ke daerah hilir bagian utara dan barat.

Dataran utama Kabupaten Jepara berdasarkan sistem hidrologi merupakan kawasan yang berada pada lereng Gunung Muria bagian barat yang mengalir sungai-sungai besar yang memiliki beberapa anak sungai. Sungai-sungai besar tersebut antara lain Sungai Gelis, Keling, Jarakan, Jinggotan, Banjaran, Mlonggo, Gung, Wisu, Pecangaan, Bakalan, Mayong dan Tunggul. Berdasarkan karakteristik topografi wilayah, aliran sungai relatif dari daerah hulu dibagian timur (Gunung Muria) ke arah barat (barat daya, barat, dan barat laut) yaitu daerah hilir (laut Jawa).

Pada daratan Kabupaten Jepara terdapat beberapa jenis tanah, yang dapat diklasifikasikan menjadi 4 jenis tanah berikut Andosol coklat, terdapat diperbukitan bagian utara dan puncak Gunung Muria seluas 3.525,469 Ha, Regosol terdapat dibagian utara seluas 2.700,857 Ha, Alluvial terdapat di sepanjang pantai utara seluas 9.126,433 Ha, Asosiasi Mediterian terdapat di pantai barat seluas 19.400,458 Ha dan Latosol yang merupakan jenis tanah paling dominan di Kabupaten Jepara terdapat di perbukitan Gunung Muria seluas 65.659,972 Ha.

Secara administratif Kabupaten Jepara terbagi dalam 16 kecamatan (dua kecamatan merupakan kecamatan baru, yaitu Kecamatan Kalinyamatan dan Kembang) yang terbagi dalam 193 desa/kelurahan. Pembagian wilayah administrasi Kabupaten Jepara berikut luasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.3
Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten Jepara

No.	Kecamatan	Ha	Persentase (%)
1	Kedung	4.306,281	4,29
2	Pecangaan	3.587,806	3,57
3	Kalinyamatan	2.370,001	2,36
4	Welahan	2.764,205	2,75
5	Mayong	6.504,268	6,48
6	Nalumsari	5.696,538	5,67
7	Batealit	8.887,865	8,85
8	Tahunan	3.890,581	3,87
9	Jepara	2.466,699	2,46
10	Mlonggo	4.240,236	4,22
11	Pakis Aji	6.055,280	6,03
12	Bangsri	8.535,241	8,50
13	Kembang	10.812,384	10,77
14	Keling	12.311,588	12,26
15	Donorejo	10.864,216	10,82
16	Karimunjawa	7.120,000	7,09
Jumlah		100.413,189	100,00

Sumber: Kecamatan dalam Angka, Tahun 2011

Salah satu Kecamatan di Kabupaten Jepara yang terbentuk dari kepulauan adalah Kecamatan Karimunjawa. Kepulauan Karimunjawa yang terletak di sebelah utara kota Semarang dengan jarak 65 mil adalah merupakan 27 gugusan pulau kecil dengan luas daratan 7.120 ha. Kebijakan nasional telah menetapkan 22 pulau diantaranya yang berfungsi sebagai Taman Nasional Laut dengan luas perairan 111.625 ha (Istanto, 1998) . Dalam skala nasional, regional dan lokal; kawasan Karimunjawa juga berfungsi dan berperan sebagai daerah tujuan wisata andalan, mengingat potensi sumberdaya alam dan lingkungannya yang relatif masih bagus jika dibandingkan dengan tempat serupa di pulau Jawa, Kepulauan Seribu (Dutton *et al*, 1993). Sumberdaya alam yang ada terdiri dari, ekosistem bahari yang meliputi sumberdaya terumbu karang dengan ikan hiasnya, rumput laut dan padang lamun, hutan mangrove; dan ekosistem daratan yang berupa hutan tropis dataran rendah dan hutan pantai. Keanekaragaman sumberdaya alam yang ada dapat dikembangkan untuk berbagai kegiatan agar dapat meningkatkan kesejahteraan penduduk setempat. Sebagian besar kegiatan yang dilakukan di kepulauan ini masih bersifat tradisional, bahkan tak jarang masih ditemukan kegiatan yang merusak kelestarian sumberdaya alam, misalnya kegiatan penambangan karang, penangkapan ikan dengan sianida dan bom, serta kegiatan pembukaan hutan mangrove untuk tambak.



Gambar 2.3.
Kecamatan Karimunjawa

Pada tahun 1988 Karimunjawa diumumkan sebagai kawasan Taman Nasional Laut dengan tujuan untuk melindungi dan memanfaatkan sumberdaya yang ada secara lestari. Pada tanggal 23 Januari 1998 secara resmi Balai Taman Nasional Karimunjawa mulai beroperasi untuk mengelola kawasan tersebut. Akan tetapi banyak ditemui permasalahan dalam pengelolaannya, baik masalah internal maupun eksternal. Permasalahan internal menyangkut dana, sarana dan prasarana pengelolaan, jumlah dan kualifikasi petugas lapangan, serta tidak tersedianya data potensi sumberdaya alamnya. Sedangkan permasalahan eksternal, menyangkut kurangnya pemahaman dan dukungan dari instansi teknis terkait serta kurangnya dukungan dan keterlibatan masyarakat setempat terhadap usaha konservasi (Istanto, 1998 dan Rao, 1998). Hal ini disebabkan karena adanya beberapa kendala dan permasalahan yang meliputi kewenangan pengelolaan, fasilitas dan aksesibilitas, kemampuan sumberdaya manusia, penerapan iptek, pendanaan dan keterpaduan dukungan program sektoral.

Penetapan kawasan sebagai Taman Nasional Laut (TNL) merupakan aset yang sangat berharga bagi kelestarian sumberdaya alam dan ekosistem alami serta plasma nutfah sehingga dapat digunakan untuk pengembangan iptek, sebagai tempat kegiatan pariwisata dan berfungsi dalam menjaga keseimbangan lingkungan.

Perencanaan pembangunan suatu kepulauan merupakan masalah yang sangat spesifik, karena sebagian besar masyarakat di kepulauan kecil memiliki tingkat pendapatan dan derajat

kesejahteraan yang rendah. Kemiskinan dan ketidak-berdayaan tersebut akan merupakan ancaman utama bagi mereka untuk turut serta dalam pengelolaan wilayah kepulauan secara berkelanjutan. Dengan demikian kita harus memberikan perhatian yang lebih besar dalam merumuskan berbagai pendekatan pembangunan kepulauan kecil tersebut demi menjaga kelestarian.

a. Topografi

Wilayah Kabupaten Jepara memiliki relief yang beraneka ragam, terdiri dari daerah dataran pantai yang tesebar di sepanjang pantai utara meliputi Kecamatan Kedung, Jepara, Mlonggo, Bangsri, dan Keling, dataran rendah dan dataran tinggi di sekitar Gunung Muria dan Gunung Clering. Kondisi topografi wilayah Kabupaten Jepara antara 0 – 1.301 meter di atas permukaan air laut. Bagian terendah berada di pantai/ pesisir dan bagian tertinggi terdapat di wilayah Kecamatan Keling atau pada kaki Gunung Muria. Kondisi topografi di tiap Kecamatan adalah sebagai berikut:

Tabel. 2.4
Ketinggian Dari Permukaan Air Laut per Kecamatan

No.	Kecamatan	Ketinggian
1.	Kedung	0 – 2 m
2.	Pecangaan	2 – 17 m
3.	Kalinyamatan	2 – 29 m
4.	Welahan	2 – 7 m
5.	Mayong	13 – 438 m
6.	Nalumsari	13 – 736 m
7.	Batealit	68 – 378 m
8.	Jepara	0 – 46 m
9.	Tahunan	0 – 50 m
10.	Mlonggo	0 – 300 m
11.	Pakisaji	25 – 1.000 m
12.	Bangsri	0 – 594 m
13.	Kembang	0 – 1.000 m
14.	Keling	0 – 1.301 m
15.	Donorojo	0 – 619 m
16.	Karimunjawa	0 – 100 m

Keterangan: Sumber: Kecamatan dalam Angka, Tahun 2011

Berdasarkan kemiringan tanahnya, secara umum wilayah Kabupaten Jepara dibedakan dalam 4 (empat) kategori, yaitu :

1. Kemiringan 0-2 % lahan datar meliputi sebagian Kecamatan Mayong, sebagian Kecamatan Nalumsari, sebagian Kecamatan Welahan, sebagian Kecamatan Pecangaan, sebagian Kecamatan Kedung, sebagian Kecamatan Jepara, sebagian Kecamatan Tahunan, sebagian Kecamatan Mlonggo, sebagian Kecamatan Bangsri, sebagian Kecamatan Kembang, sebagian Kecamatan Keling, Kecamatan Karimunjawa dan sebagian wilayah Batealit.

2. Kemiringan 2-15 % lahan landai meliputi sebagian Kecamatan Mayong, sebagian Kecamatan Nalumsari, sebagian Kecamatan Batealit, sebagian Kecamatan Jepara, sebagian Kecamatan Tahunan, sebagian Kecamatan Mlonggo, sebagian Kecamatan Bangsri, sebagian Kecamatan Keling, sebagian kecil wilayah utara Pecangaan dan Kedung.
3. Kemiringan 15-40 % lahan agak curam meliputi sebagian Kecamatan Mayong, Kecamatan Nalumsari, Kecamatan Batealit, sebagian kecil Kecamatan Mlonggo, sebagian Kecamatan Bangsri dan sebagian Kecamatan Keling. Merupakan daerah di sekitar gunung Muria, Trawean, Genuk, dan Pucang Pendawa.
4. Kemiringan > 40 % lahan sangat curam meliputi wilayah puncak gunung Muria, Trawean, Genuk, dan Pucang Pendawa. Terletak di Kecamatan Mayong, Batealit, Mlonggo, Bangsri dan Keling.

b. Jenis Tanah

Jenis tanah yang ada di Kabupaten Jepara dibedakan atas 5 jenis tanah. Secara rinci penyebaran jenis tanah di Kabupaten Jepara dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Tanah Andosol Coklat. Terdapat di perbukitan dan puncak Muria bagian utara Muria dengan luas tanah 3.525.469 Ha, atau 3,15 %.
2. Tanah Regusol. Terdapat di bagian utara Kabupaten Jepara dengan luas tanah 2.700,857 Ha atau 2,69 %
3. Tanah Alluvial. Terdapat di sepanjang pantai utara dengan luas tanah 9.126,433 Ha, atau 9,09 %.
4. Tanah Asosiasi Mediteran. Terdapat di pantai barat Kabupaten Jepara dengan luas tanah 19.400,458 Ha, atau 19,32 %
5. Tanah Latosol. Jenis tanah ini paling dominan di Kabupaten Jepara terdapat di perbukitan Gunung Muria dengan luas tanah 65.659,972 Ha, atau 65,39%.

Berdasarkan kondisi geologinya secara umum wilayah Kabupaten Jepara dibedakan menjadi 2 bagian, yaitu :

- Di sepanjang garis pantai utara, yang meliputi wilayah dengan morfologi dataran-bergelombang.
- Bagian Timur dengan morfologi berupa perbukitan.

Kabupaten Jepara terletak di sebelah barat Gunung Muria. Gunung Muria terletak di atas batuan neogen yang berupa batu gamping, batu lempung dan nepal. Penyebaran setiap litologi penyusunan tersebut diuraikan sebagai berikut:

1. Batu Gamping: tersingkap sebagai inklusi di daerah puncak Gunung Genuk dan kawah rahtawu dan pada bantuan itu mengandung fosil foraminifera kecil cyclocypeous sebagai indikator umur. Sebagian dari inklusi batu gamping tersebut menunjukkan gejala telah tertetamorfosa.
2. Batu kerikil/batu pasir, mengandung fosil vertebrata. Adanya fosil vertebrata tersebut menunjukkan indikasi pembentukan batuan ini pada lingkungan darat.
3. Batu lanau, batu pasir, koilin, andesit dan breksi-breksi gunung api umumnya mengandung fosil vertebrata sebagai indikator lingkungan darat yang berumur pleistosin tengah.
4. Kerikil, pasir, lempung merupakan litologi hasil proses fluviovulkanik pada kala holosen dan terletak tak selaras diatas endapan hasil kegiatan gunung berapi.

c. Hidrologi dan Hidrogeologi

Kabupaten Jepara termasuk dalam wilayah Sub DAS Jratun Seluna (Jragung, Tuntang, Serang, Lusi, dan Juana). Aliran sungai ini titik beratnya diarahkan pada pemanfaatan secara optimal sekaligus rehabilitasi terhadap sumber alam hutan, tanah dan air yang rusak serta untuk meningkatkan pembangunan pertanian yang dapat memberikan pengaruh pada sektor lain. Sungai-sungai besar yang dijumpai di Kabupaten Jepara diantaranya : Sungai Bakalan, Kaweden, Pecangaan, Troso, Sirahan, Mlonggo, Kancilan, Balong, Gelis, Pasokan, Tunggul, Mayong, Sengon, Kedung Bule, Tuk Abul, Bapangan, Kembar Rawi, Banjaran, Jeruk, Wangkong, Blitar, Wareng dan Suru.

Potensi air permukaan tanah dan air dalam tanah di daerah Kabupaten Jepara cukup besar. Air Permukaan umumnya berupa sungai. Air dalam tanah dapat dibagi 3 daerah menurut keadaan airnya, yaitu:

- Daerah air tawar, meliputi daerah kaki gunung Muria, mempunyai mutu air yang baik dan digunakan sebagai sumber air minum.
- Daerah air tanah payau, meliputi daerah dataran rendah yang merupakan batas antara air tanah asin dengan air tanah tawar. Persebaran akuifernya tidak merata pada tiap tempat dengan ketebalan antara 2-7 m. Air ini relatif masih bisa digunakan.
- Daerah air asin, meliputi daerah dataran di pinggiran pantai atau pantai yang menjorok ke daratan.

Kabupaten Jepara sebagaimana kota-kota di Pantai Utara Jawa beriklim tropis dengan dua musim bergantian sepanjang tahun yaitu penghujan dan kemarau. Berdasarkan katagori iklim menurut Schmidt dan fergusson, Kabupaten Jepara termasuk pada golongan iklim type D (sedang). Prinsip yang digunakan dalam kategori iklim menurut Schmidt dan Fergusson yaitu dengan mengambil data bulan kering dan bulan basah. Bulan basah adalah jika curah hujan lebih dari 100 mm/bulan sedangkan bulan kering jika curah hujan kurang dari 60 mm/bulan.

Suhu atau temperatur rata-rata di Kabupaten Jepara setiap bulan berkisar antara 21,55° - 32,71° Celcius. Berdasarkan data tahun 2010, banyaknya hari hujan tertinggi rata-rata terjadi pada bulan januari, yaitu 172 hari hujan dan terendah terjadi pada bulan agustus, yaitu 37 hari hujan serta jumlah hari hujan rata-rata adalah 149 hari. Curah hujan tertinggi terjadi pada bulan januari, yaitu 4.978 mm dan terendah pada bulan agustus, yaitu 412 mm sedangkan curah hujan rata-rata adalah 2.006 mm/tahun. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.5
Banyaknya Hari Hujan Dan Curah Hujan Di Kabupaten Jepara Tahun 2010

No	Kecamatan	Jumlah Hari Hujan (Hari)	Jumlah Curah Hujan Rata-Rata(mm)
1.	Kedung	143	1.823
2.	Pecangaan (**)	-	-
3.	Kalinyamatan (*)	-	-
4.	Welahan (*)	-	-
5.	Mayong(**)	-	-
6.	Nalumsari	125	1.380
7.	Batealit	150	2.013
8.	Tahunan (**)	-	-
9.	Jepara	158	2.058
10.	Mlonggo	153	2.015
11.	Pakisaji (*)	-	-
12.	Bangsri	143	2.138
13.	Kembang (*)	-	-
14.	Keling	181	2.617
15.	Donorejo (*)	-	-
16.	Karimunjawa (*)	-	-
JUMLAH (2010)		1.053	14.044
RATA-RATA (2010)		150	2.006

Keterangan : (*) Tidak mempunyai alat
(**) Alat rusak

Sumber: Kabupaten Jepara Dalam Angka 2011

d. Penggunaan Lahan

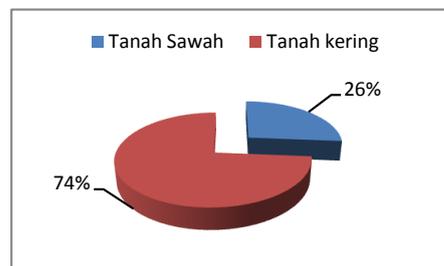
Potensi sumber daya alam meliputi sumber daya alam abiotik dan biotik. Potensi biotik merupakan potensi yang berasal dari aneka ragam flora dan fauna, sedangkan potensi abiotik merupakan potensi yang berasal dari jenis tanah, sungai, bahan galian, dll.

Potensi biotik yang berasal dari flora antara lain tanaman liar maupun tanaman yang diusahakan seperti tanaman pertanian, perkebunan, tanaman pekarangan, dan hutan negara. Sedangkan yang berasal dari fauna berupa peternakan dan perikanan.

Potensi abiotik yang dimiliki Kabupaten Jepara berupa jenis tanah yang meliputi tanah andosol coklat, regosol, alluvial, aosiasi mediteran dan tanah latosol, yang memungkinkan untuk diusahakan sebagai lahan pertanian, perkebunan, hutan, tambak, dan permukiman. Selain itu dengan adanya sungai yang melewati Kabupaten Jepara merupakan potensi perairan yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber irigasi. Potensi sumber daya alam yang lain yang dapat ditonjolkan di Kabupaten Jepara adalah potensi pariwisata dan pertambangan bahan galian.

Obyek wisata alam yang cukup potensial menurut Propeda Kabupaten Jepara tahun 2001-2005 antara lain taman rekreasi Pantai Kartini dengan berbagai fasilitas pasir laut, Pantai Tirta Samudra Bandengan yang memiliki pantai pasir putih, Gua Tritip, Wana Wisata Sreni Indah, Taman Nasional Laut Kepulauan Karimunjawa, Pulau Panjang sebagai obyek wisata alam bahari, dan Air Terjun Songgolangit.

Kabupaten Jepara yang memiliki luas wilayah sebesar 100.413,189 Ha atau 1.004,132 Km² dengan tata guna lahan yang terdiri dari: tanah sawah seluas 26.408,004 Ha atau 26% dan tanah kering 74.005,185 Ha atau 74% (Sumber: Kecamatan dalam Angka, 2011).



Gambar 2.4
Grafik Prosentasi Penggunaan Tanah Sawah dan Tanah Kering di Kabupaten Jepara

Kecamatan Keling merupakan daerah yang memiliki wilayah paling luas yaitu 12.311,588 ha yang terdiri dari 2.266,241 ha tanah sawah dan 10.045,347 ha tanah kering. Sedangkan daerah yang memiliki luas paling kecil yaitu Kecamatan Kalinyamatan seluas 2.370,001 ha yang terdiri dari 1.391,358 ha tanah sawah dan 978,643 ha tanah kering.

2.1.2 Profil Demografi

Jumlah penduduk Kabupaten Jepara pada kurun waktu 5 tahun yaitu tahun 2005–2010 mengalami fluktuasi. Penurunan terjadi pada tahun 2005 – 2006, dan 2009-2010, sedangkan selama kurun waktu tahun 2007 – 2008 mengalami kenaikan. Jumlah penduduk Kabupaten Jepara pada tahun 2006 sebesar 1.058.064 jiwa dan pada tahun 2010 sebesar 1.097.280 jiwa, sehingga dapat diketahui tingkat pertumbuhannya sebesar 0,4%. Lebih rincinya adalah sebagai berikut:

Tabel 2.7
Rata-rata Pertumbuhan Penduduk (Tahun 2005-2010)
Di Kabupaten Jepara

Tahun	Jumlah Penduduk Akhir Tahun	Pertambahan Penduduk	Prosentase (%)
2005	1,078.037	18399	1.74
2006	1,058.064	-19973	-1.85
2007	1,073,631	15567	1.47
2008	1,090,839	17208	1.6
2009	1,107,973	17134	1.57
2010	1,097,280	-10693	-0.98
Rata-rata pertumbuhan			0.6

Sumber: Kecamatan Dalam Angka, 2011

Apabila dirinci tiap kecamatan, jumlah penduduk terbesar tahun 2010 di Kecamatan Tahunan yaitu 101.581 jiwa dan penduduk terkecil di Kecamatan Karimunjawa yaitu 8.175 jiwa.

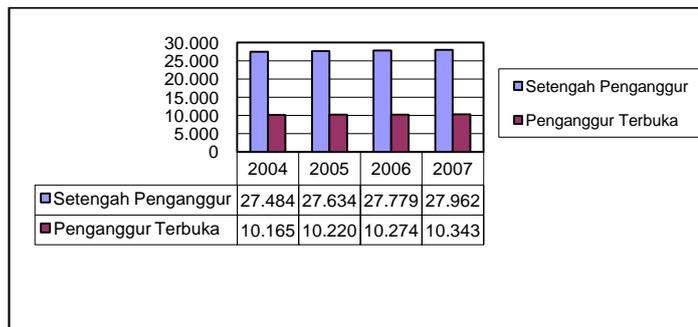
Kepadatan penduduk Kabupaten Jepara dari tahun 2010 adalah 10 jiwa/Ha. Kecamatan yang memiliki tingkat kepadatan penduduk lebih tinggi dibanding tingkat kepadatan penduduk kabupaten adalah Kecamatan Kedung, Pecangaan, Kalinyamatan, Welahan, Tahunan, Jepara dan Mlonggo. Sedangkan kecamatan yang memiliki kepadatan penduduk paling tinggi adalah Kecamatan Jepara (32 jiwa/ha). Pada periode tahun yang sama, kecamatan yang memiliki tingkat kepadatan penduduk lebih rendah dari kepadatan penduduk kabupaten adalah Kecamatan Mayong, Nalumsari, Batealit, Pakis Aji, Bangsri, Kembang, Keling, Donorejo dan Karimunjawa, dengan kecamatan yang memiliki kepadatan penduduk terendah adalah Kecamatan Karimunjawa (1 jiwa/ha). Selengkapny mengenai jumlah dan perkembangan penduduk, dan kepadatan penduduk di Kabupaten Jepara dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.6
Jumlah dan Kepadatan Penduduk tahun 2010

NO	KECAMATAN	KEPADATAN PENDUDUK TAHUN 2010		
		JUMLAH	Luas Wilayah (Km ²)	Kepadatan Pddk (Per Km ²)
1	Kedung	70.835	43,063	1.645
2	Pecangaan	77.172	35,398	2.151
3	Kalinyamatan	58.140	24,180	2.453
4	Welahan	69.496	27,642	2.514
5	Mayong	82.831	65,043	1.273
6	Nalumsari	68.606	56,965	1.204
7	Batealit	77.923	88,879	877
8	Tahunan	101.581	38,906	2.611
9	Jepara	79.508	24,667	3.223
10	Mlonggo	77.794	42,396	1.835
11	Pakis Aji	54.690	60,560	903
12	Bangsri	93.798	85,360	1.099
13	Kembang	64.798	108,116	599
14	Keling	58.435	123,120	475
15	Donorojo	52.958	108,640	457
16	Karimunjava	8.175	71,200	122
Jumlah		1.097.280	1004,135	1.093

Sumber: Jepara Dalam Angka Th 2011

Mata pencaharian merupakan salah satu aspek yang sangat penting di dalam proses pembangunan wilayah. Hal ini untuk menunjukkan seberapa besar tingkat kesejahteraan dan kehidupan masyarakat dalam kaitannya dengan kemajuan pembangunan di wilayah tersebut. Dari tahun 2005-2009 penduduk menurut mata pencaharian terbesar bekerja di sektor industri, dan terkecil bekerja di sektor pertambangan. Namun, untuk sektor industri mengalami penurunan dari tahun 2005-2009. Mata pencaharian yang mengalami peningkatan adalah perdagangan, walaupun sempat mengalami penurunan tapi pada tahun 2009 mengalami kenaikan menjadi 21 %.



Gambar 2.4.
Jumlah Penganggur

Bertambahnya penduduk yang bekerja di 9 sektor lapangan pekerjaan, berdampak memberikan tekanan yang tinggi terhadap kelestarian alam, eksploitasi terhadap lahan maupun perairan laut telah terjadi dalam waktu beberapa tahun terakhir. Disisi lain pemecahan masalah ketenagakerjaan sedikit terbantu oleh penempatan tenaga kerja ke luar negeri.

2.1.3 Profil Sosial Budaya

Kehidupan budaya masyarakat Kabupaten Jepara pada umumnya sangat dipengaruhi oleh budaya orang-orang pesisir/pantai. Budaya masyarakat pesisir pada umumnya mempunyai etos kerja yang kuat dan jiwa kewirausahaan yang besar.

Kehidupan budaya masyarakat ini akan membawa dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi daerah, hal itu dapat dilihat antara lain dengan banyaknya jumlah penduduk yang mata pencahariannya tidak tersentral dalam 1 atau 2 sektor saja, tetapi tersebar di semua sektor-sektor lapangan usaha.

Perilaku masyarakat Kabupaten Jepara ada yang lebih cenderung disebut masyarakat kota. Akan tetapi terdapat juga adat istiadat masyarakat yang masih bersifat pedesaan/tradisional, terutama pada beberapa kecamatan yang berada di pinggiran.

Kelompok adat istiadat yang ada di Kabupaten Jepara dapat dikelompokkan sebagai berikut:

- Perilaku masyarakat perkotaan; kondisi masyarakat dengan dominasi kegiatan pada sektor-sektor perdagangan jasa dan industri.
- Perilaku masyarakat pedesaan; terdiri dari masyarakat petani dan masyarakat nelayan. Kondisi ini lebih bersifat homogen, yaitu pada sektor agraris.

Kondisi kesejahteraan sosial yang ada sebetulnya sudah didukung oleh ketersediaan sarana-sarana kesejahteraan seperti panti sosial asuhan anak sebanyak 33 buah. Namun demikian dilihat dari jumlah dan kualitas pelayanan belum sepenuhnya dapat menangani permasalahan yang dihadapi. Untuk itu diperlukan pemikiran dan pemecahan masalah secara komprehensif, mengingat penyebab masalah sosial adalah sangat kompleks.

Kesadaran beragama di Kabupaten Jepara cukup tinggi, hal itu digambarkan dengan fasilitas tempat-tempat ibadah sangat memadai dan cenderung meningkat baik kuantitas maupun kualitasnya, serta kondusifnya situasi kerukunan antar umat beragama.

2.2 KONDISI PRASARANA BIDANG PEKERJAAN UMUM / CIPTA KARYA

2.2.1 Permukiman Kumuh

Permukiman kumuh (*squatters*) di wilayah perencanaan, kondisi ini terlihat dari lingkungan permukiman yang liar dengan nempati lahan ilegal, serta kondisi fisik lingkungan dan bangunan jelek, tanpa dilayani sarana dan prasarana, khususnya yang mendukung kebersihan lingkungan seperti sanitasi, persampahan dan drainase, yang biasanya terdapat di pusat-pusat kota yang memiliki kepadatan tinggi. Kondisi ini dilihat dari tingkat kepadatan *netto* dari masing-masing kelurahan dan berdasarkan hasil survei lapangan kondisi ini sesuai dengan hasil yang didapat di lapangan.

Hal yang dapat dilakukan untuk permukiman liar (*squatters*), yaitu dengan penataan dan peremajaan kawasan lingkungan perumahan dan permukiman dengan kepadatan tinggi, selain itu dapat dilakukan dengan pembangunan rumah susun untuk kawasan pusat kota dengan kepadatan tinggi/kumuh berat, serta adanya pengendalian terhadap permukiman kumuh khususnya untuk permukiman kumuh dengan kategori *squatters*.



Permukiman kumuh yang ada di Kecamatan Jepara merupakan kumuh nelayan, dimana lokasinya dekat dengan wilayah pantai. Kondisi rumah yang satu dengan yang lain jaraknya dekat berdekatan dan berhimpit-himpitan

Selain itu dengan pemberian status kepemilikan lahan bagi para pemukim yang menempati lahan yang sesuai dengan peruntukannya dan pembuatan ruang terbuka hijau. Serta pengembangan perumahan dengan batas-batas tertentu untuk kawasan yang termasuk dalam kategori kumuh ringan. Untuk permukiman kumuh dengan kategori *slums* ini identik dengan permukiman di kawasan bercirikan pedesaan. Permukiman ini merupakan permukiman legal, namun secara fisik, sosial dan budaya kurang memperdulikan lingkungan tempat tinggalnya atau dapat dikatakan kesadaran masyarakat di permukiman tersebut terhadap kebersihan lingkungan masih sangat kurang. Hal yang dapat dilakukan untuk permukiman kumuh (*slums*), yaitu dengan perbaikan dan peningkatan kualitas lingkungan untuk kawasan kumuh (*slums*), melibatkan masyarakat secara langsung dalam proses

perencanaan dan penataan (*participatory planning*) sejak awal, selain itu dengan penyediaan sarana dan prasarana (P3KT dan PKL), serta adanya pembuatan ruang terbuka hijau

2.2.2 Permasalahan Perumahan dan Permukiman yang Tidak Sesuai dengan Tata Ruang Kawasan Permukiman Sempadan Sungai

Bantaran sungai atau sempadan sungai merupakan kawasan sepanjang kanan kiri sungai dengan jarak 100 meter untuk sungai besar dan 50 meter di kanan kiri untuk anak sungai yang berada di luar permukiman, sementara untuk sungai di kawasan permukiman berupa sempadan sungai yang diperkirakan cukup untuk membangun jalan inspeksi antara 10 – 15 meter. Namun, pada kenyataannya masih banyak permukiman yang berada di daerah bantaran sungai. Kawasan permukiman sempadan sungai ini adalah kawasan permukiman yang berada di sepanjang kanan kiri sungai, termasuk sungai buatan/saluran irigasi primer, yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai.

Bantaran sungai seharusnya merupakan daerah terlarang untuk permukiman, akan tetapi berhubung semakin mahalnya harga lahan untuk pembangunan rumah banyak masyarakat yang memilih tinggal di lokasi semacam itu. Banyak *squatters* (permukiman liar) yang tinggal di bantaran sungai karena mereka menganggap bahwa masih banyak terdapat lahan tak bertuan yang sebenarnya milik pemerintah dan merupakan *public space* (ruang umum). Pada umumnya pengamanan lahan di bantaran sungai tidak begitu ketat sehingga memungkinkan tumbuhnya penghunian dan penggunaan tidak sah. Murahnyalah lahan ini yang menjadi pertimbangan utama bagi *squatter* yang mencari tempat hunian yang dekat dengan tempat kerjanya. Hunian di bantaran sungai ini terus berkembang dan semakin menjorok ke sungai sehingga mengganggu aliran sungai yang selanjutnya dapat menimbulkan bahaya banjir yang berdampak bagi masyarakat luas.

Masyarakat yang tinggal di sekitar bantaran sungai seringkali mempunyai kebiasaan buruk yaitu membuang sampah ke sungai yang menyebabkan pendangkalan dan sumbatan di beberapa tempat. Permukiman yang ada di kawasan sempadan sungai di wilayah perencanaan sebagian besar berada di Kecamatan Jepara (Desa Demaan, Jobokuto, Pengkol dan Ujungbatu), Kalinyamat, Kedung dan Bangsri (tepatnya di Desa Wedelan, Bangri dan Kedungleper). Kawasan permukiman sempadan sungai ini adalah kawasan permukiman yang berada di sepanjang kanan kiri sungai, termasuk sungai buatan/saluran irigasi primer, yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai.

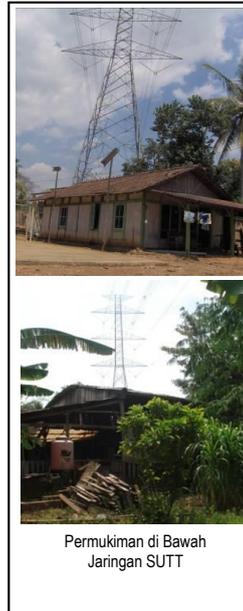


Permukiman di Sempadan Sungai

Kawasan Perumahan dan Permukiman di Koridor SUTT

Perumahan dan permukiman yang berada di bawah SUTT sangat membahayakan orang yang tinggal di sekitar jaringan tersebut. Hal ini disebabkan jalur tegangan tinggi dari SUTT mempunyai pengaruh yang negatif terhadap kesehatan, keselamatan dan keamanan manusia. Sebab jalur listrik tegangan tinggi mempunyai daya listrik hingga ribuan watt. Oleh karena itu, seharusnya jalur listrik tegangan tinggi ini tidak berada tepat di atas permukaan untuk menghindari dari hal-hal yang tidak diinginkan seperti kejadian konsleting listrik, adanya pengaruh medan magnet listrik yang dapat mempengaruhi kesehatan penduduk.

Jaringan SUTET dan SUTT mempunyai pengaruh negatif terhadap kesehatan masyarakat, disamping dari segi keamanan. Sebab jaringan SUTET dan SUTT mempunyai daya listrik hingga ribuan watt, untuk mengantisipasi hal tersebut pembangunan jalur SUTET dan SUTT dapat disesuaikan dengan arahan dari RTRW. Untuk jaringan listrik yang melewati wilayah perencanaan yang perlu diperhatikan adalah jaringan listrik dengan tegangan tinggi. Kawasan permukiman di koridor jaringan listrik tersebut terdapat di Kecamatan Bangsri (tepatnya di Desa Bangsri, Tengguli, Wedelan dan Jerukwangi) dan Kecamatan Mlonggo tepatnya di Desa Jambu Timur, Kecamatan Nalumsari tepatnya di Desa Karangnongko, Mulyologo, dan Kecamatan Mayong tepatnya di Desa Pule, Buaran, datar, Rajegwesi, serta Kecamatan Batealit tepatnya di Desa Raguklampitan, Ngasen, Mindahan Kidul, dan Bringin.



Permukiman di Bawah Jaringan SUTT



Permukiman di Bawah Jaringan SUTT Kecamatan Mlonggo

Reklamasi Liar

Aktivitas Reklamasi liar merupakan pemanfaatan tanah timbul yang berada di sepanjang pantai, dimana hal ini dilakukan secara ilegal. Tanah timbul ini terbentuk dari proses sedimentasi atau pengendapan lumpur yang terus menerus terjadi sehingga membentuk suatu daratan, yang kemudian dimanfaatkan oleh masyarakat di daerah pesisir untuk sebagai lahan permukiman. Mereka beranggapan tanah tersebut tidak bertuan karena tidak jelas kepemilikannya. Apalagi harga tanah dari waktu ke waktu semakin mahal dan tidak sebanding dengan pendapatannya yang relatif rendah sebagai nelayan, semakin mendorong keinginan untuk memanfaatkan tanah timbul tersebut sebagai lahan permukiman. Aktivitas Reklamasi liar ini ditemukan di Kecamatan Jepara, khususnya di Kelurahan Bulu, dan Kelurahan Demaan.



Aktivitas reklamasi liar ini berpotensi menimbulkan masalah yang lebih kompleks di kemudian hari apabila tidak segera ditangani. Sebab hal ini akan mempengaruhi anggota masyarakat yang lain untuk turut mendirikan bangunan secara liar di tanah tersebut. Hal lain yang mengkhawatirkan adalah semakin dekatnya pantai dengan bangunan sehingga sangat rawan terkena abrasi air laut, dan akan dapat mengganggu kelestarian fungsi pantai. Permasalahan ini

perlu ketegasan pihak-pihak aparat pemerintah dalam mengimplementasikan peraturan perizinan mendirikan bangunan.

Kawasan Permukiman di Rawan Bencana/Longsor

Kawasan rawan bencana/longsor, identik dengan kawasan yang teridentifikasi sering terjadi bencana alam seperti tanah longsor, letusan gunung berapi, banjir dan kekeringan. Untuk Wilayah perencanaan kawasan permukiman yang berada di kawasan rawan bencana/longsor yaitu permukiman yang berada di daerah rawan longsor meliputi Kecamatan Nalumsari (Desa Bategede), Kecamatan Mayong 9Desa Pule, Pancur, datar, Bandung dan Bungu), Kecamatan Batealit 9Desa Ragukplampitan, Sumosari dan Batealit), Kecamatan Jepara (Desa Babadan), Kecamatan Mlonggo (Desa Jambu Timur), Bangsri 9Desa Papasan, Tengguli), Kembang (Desa Dudakawu, Bucu, Sumanding), Keling (Desa Tempur, Klepu, Tunahan, Damarwulan, Kunir) dan Kecamatan Donorejo (Desa Tulakan).

Beberapa lokasi permukiman yang berda di daerah rawan banjir antara lain terdapat di Kecamatan Welahan (Desa Ujungpandan, Kuanyar, Kedungsarimulyo, Kalipucang Kulon dan Ketilengsinggelo), Kecamatan Mayong (Desa Nдорang, Paren, Tigajuru dan Kuanyar), Kecamatan Kalinyamatan (Desa Batukali), Kecamatan Pecangaan (Desa Kaliombo, Karangrandu dan Gerdu), dan Kecamatan Kedung (Desa Surodadi, Sowan Kidul dan Wanusobouran Lor). Walaupun jumlah tidak terlalu banyak namun lokasi tersebut membutuhkan pengendalian untuk pencegahan keberlanjutan pembangunan yang dilakukan oleh masyarakat atau pengembang.

Untuk di wilayah perencanaan, masih banyak kawasan-kawasan rawan longsor yang ditempati penduduk sebagai tempat hunian. Hal ini dipengaruhi oleh kurangnya pengetahuan masyarakat tentang kawasan lindung yang terlarang untuk permukiman. Selain itu akibat dari kurang tegasnya pengendalian pembangunan dan aparat pemerintah wilayah perencanaan.

Hal yang perlu dilakukan antara lain: pengawasan dan pengendalian pembangunan perumahan baru di kawasan rawan longsor, kepadatan bangunan diarahkan dengan kepadatan rendah, harus ada pembatasan kepadatan dan pertumbuhan fisik-aktivitas kawasan, kepadatan diarahkan < 30 unit/Ha dengan luas tanah bangunan < 100 m², kawasan rawan bencana banjir



Permukiman di Kawasan Rawan Longsor di Kecamatan Jepara

Comment [G1]: Kecamatan Jepara tidak ada Desa Babadan

sedapat mungkin tidak dipergunakan untuk permukiman, demikian pula kegiatan lain yang dapat merusak atau mempengaruhi kelancaran sistem drainase, pada daerah rawan banjir ini perlu adanya pemantapan kawasan lindung diataranya dengan langkah reboisasi jenis tanaman khusus (tanaman tahunan).

2.2.3 Persampahan

Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Kebersihan Kabupaten Jepara sebagai lembaga yang ditugasi menangani kebersihan kota telah melakukan pengelolaan sampah dengan optimal, meskipun terdapat beberapa keterbatasan. Hal ini menunjukkan dengan telah diraihnya penghargaan ADIPURA oleh Pemerintah Kabupaten Jepara selama 7 (tujuh) kali berturut-turut sehingga menjadikan Jepara sering mendapat kunjungan studi banding dari Kabupaten/kota yang lain, bahkan luar provinsi dan Pulau Jawa. Adapun keterbatasan yang ditemui, sebagai berikut :

1. Banyaknya tenaga kebersihan (penyapu jalan dan pengangkutan) yang berusia lanjut sehingga perlu penggantian. Proses penggantian membutuhkan waktu dan pembinaan khusus untuk penyesuaian tenaga kerja baru.
2. Masih kurangnya tenaga kerja kebersihan TOSSA yang bertugas sebagai sapu ranjau menangani wilayah yang belum terjangkau.
3. Belum memadainya sarana prasarana pendukung pelaksanaan pelayanan kebersihan, baik segi kualitas maupun kuantitas. Seperti dump truck, armroll, bak container, dan armada sampah lain yang jumlahnya belum mencukupi serta telah melampaui batas umur ekonomis sehingga kurang efektif dalam penanganan sampah.
4. Terbatasnya jumlah aparat yang menguasai konsep 3R (Resuce-Reuse-Recycle) secara praktis.

Selain keterbatasan diatas, permasalahan juga timbul dari sudut masyarakat yaitu kurangnya peran serta aktif masyarakat, sebagai berikut:

1. Masih ditemukan warga yang membuang sampah di sembarang tempat, saluran air, saluran drainase dan sungai.
2. Masih ditemukan warga masyarakat yang membakar sampah baik di halaman rumah, tepi jalan, tepi sungai dan sebagainya.
3. Masih banyak warga yang kurang memahami program pemerintah dalam hal pengelolaan sampah, missal 3R, dengan melakukan pengurangan, pemilihan dan pemakaian kembali sumber sampah, serta anggapan bahwa sampah merupakan tanggung jawab pemerintah.



Sampah yang di Buang di Sembarang Tempat

Tempat Pembuangan Akhir di Jepara berada di 3 (tiga) lokasi yaitu, di Bandengan, Bangsri dan Gemulung, dengan ritasi untuk Dump truk rata-rata 4 kali dan Arm Roll 12 kali dalam 1 hari. Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang ada di Kabupaten Jepara terdiri dari :

- TPA Bandengan

TPA Bandengan berada di Kecamatan Jepara. Luas TPA Bandengan adalah 1.75 Ha dan dilengkapi fasilitas IPLT. Sistem pengolahan sampah dengan cara Control Landfill (Uruk Tanah) dan sistem vermikasi (seluas 3250 m²). Jangkauan pelayanan TPA Bandengan adalah kota Jepara.



Gambar 3. 1

Lokasi TPA Bandengan

- TPA Gemulung

TPA Gemulung berada di Kecamatan Pecangaan. Luas TPA Gemulung adalah 2910 m². sistem pengolahan sampah dengan cara Control landfill (Uruk Tanah). Jangkauan pelayanan TPA Gemulung meliputi Kecamatan Pecangaan, Mayong, Welahan dan Kedung.



Gambar 3. 2
Lokasi TPA Gemulung

- TPA Krasak

TPA Krasak berada di Kecamatan Bangsri. Luas TPA Krasak adalah 460 m². sistem pengolahan sampah dengan cara Control Landfill. Jangkauan pelayanan TPA Krasak mencakup Mlonggo, Bangsri, dan Keling.

Sampah yang ada di Kabupaten Jepara merupakan timbulan dari kegiatan rumah tangga, pertokoan, perkantoran, dan pasar. Saat ini pengelolaan persampahan di sebagian wilayah Kabupaten Jepara telah terlayani. Sedangkan sebagian wilayah lain yang belum tertangani cenderung menggunakan sistem pembuangan on site dengan ditimbun atau dibakar. Namun untuk wilayah dengan kepadatan cukup tinggi karena ketersediaan lahan untuk membuat menimbun atau membakar sudah menipis, sampah-sampah terpaksa dibuang ke sungai-sungai.

Metode secara umum yang digunakan composting dengan menggunakan 2 metode yakni Vermikasi atau pengolahan sampah organik dengan memanfaatkan cacing tanah untuk dibuat kompos dan yang kedua dengan menggunakan metode segitiga bamboo untuk proses pelapukan sampah organik menjadi pupuk.

Sedangkan untuk daur ulang sampah non organik dilakukan kerja sama dengan pihak pemulung sebagaimana surat perjanjian tertanggal 1 Pebruari 2007 dan untuk memudahkan pelaksanaannya telah tersedia seperangkat alat untuk pencacah plastic dan pencacah sampah organik.

Jumlah dan jenis alat berat yang ada di TPA, adalah:

- Excavator 1 unit,
- Seperangkat alat pemilah sampah dan pencacah sampah organik.

Fasilitas yang dimiliki oleh TPA Bandengan telah disesuaikan dengan prosedur yang disyaratkan antara lain:

Pengelolaan di Tempat Pembuangan Akhir menggunakan 2 (dua) sistem, yaitu :

a. *Controlled Land Fill*

Sampah dibuang ke parit, daerah cekungan, atau daerah lereng, kemudian ditimbun dengan lapisan tanah dan dipadatkan. Metode ini mempunyai tiga macam cara yaitu metode area, metode trench dan metode depression. Metode ini membutuhkan lahan yang luas dan tanah untuk menimbun dengan volume yang besar.

b. Daur Ulang Cell

Daur Ulang Cell, merupakan metode lain yang digunakan dalam TPA, yaitu dengan membuat kotak-kotak cell yang ditata berurutan untuk diisi dengan sampah organik. Sampah-sampah tersebut kemudian dibiarkan minimal 2 - 3 tahun, setelah itu dibongkar dan diayak untuk dijadikan pupuk kompos. Sisa produksi yang ada selama ini difungsikan menjadi tanah penutup untuk *Controlled Land Fill*.

Upaya minimalisasi jumlah sampah di TPA ini di samping dengan mengandalkan pemulung dalam pemilahan sampah, juga digunakan metode komposting, yaitu :

a. *Segitiga Bambu*

Berupa metode pengomposan dengan menempatkan sampah-sampah organik dalam segitiga bambu, ditutup dengan plastik, disiram air, dibalik beberapa kali dengan proses yang sama selama 1 – 2 bulan. Pelapukan yang terjadi kemudianlah yang menjadikan menjadi pupuk kompos. Tingkat produksinya rata-rata komposing sampah TPA dengan metode segitiga dan penambahan EM 4 dengan produksi + 4 ton/ bulan.

b. *Vermikasi*

Vermikasi merupakan pengolahan sampah dengan memanfaatkan budidaya cacing lumbricus rubellus. Metode ini adalah dengan memanfaatkan sampah organik dan sampah dari pasar yang dicacah kemudian dicampurkan dengan kotoran sapi dan buangan RPH. Campuran inilah yang kemudian menjadi makanan bagi cacing. Hasil buangan / kotoran cacing (Kascing) inilah yang dimanfaatkan sebagai pupuk. Tingkat produksinya rata-rata komposing dengan sistem vermikasi dengan produksi + 4 ton/ bulan.

2.2.4 Drainase

Prasarana drainase merupakan prasarana yang saat ini menjadi sangat penting, sekalipun hanya untuk mengalirkan air hujan. Dikatakan demikian karena terkait dengan permasalahan banjir yang sering melanda Kabupaten Jepara di beberapa tempat. Kebutuhan prasarana drainase dapat dibedakan menjadi kebutuhan domestik, perdagangan dan fasilitas sosial.



2.2.5 Air Bersih

Kebutuhan air bersih pada masa mendatang harus menjadi perhatian Kabupaten Jepara, mengingat air bersih merupakan kebutuhan yang sangat vital bagi masyarakat. Permasalahan klasik yang dihadapi dengan air bersih adalah masih rendahnya kinerja pelayanan air bersih, yaitu belum meratanya sistem jaringan air bersih dan masih minimnya kapasitas air bersih.

Permasalahan pokok air bersih adalah masih banyak penduduk atau rumah tangga yang belum mendapatkan air bersih. Hal ini menjadi tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk menjamin hak setiap orang dalam mendapatkan air minum sebagai kebutuhan pokok minimal sehari-hari guna memenuhi kebutuhan yang sehat dan bersih.

2.3 RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDRAL CIPTA KARYA TAHUN 2010 - 2014

Dengan ditetapkannya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2010 – 2014 dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 02/PRT/M/2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum Tahun 2010-2014, maka tiap Kementrian dan Lembaga Pemerintah juga harus menyusun rencana strategisnya.

Renstra Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum meliputi uraian tentang Amanat Undang-Undang, Tugas, Fungsi dan Kewenangan serta Peran Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kondisi dan Tantangan serta Isu Strategis, Visi dan Misi Direktorat Jenderal Cipta Karya, Tujuan, Sasaran, Arah Kebijakan, Strategi, Program, Kegiatan dan Target Capaian yang dilengkapi dengan pendanaan, indikator output, outcome dan Indikator Kinerja Utama (IKU).

Renstra Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum merupakan acuan untuk menyusun Rencana Kerja Direktorat Jenderal Cipta Karya yang dijabarkan lebih lanjut oleh setiap Direktorat/Satminkal di lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya dalam penyusunan program 5 (lima) tahun masing-masing Direktorat/Satminkal

Pada Kementerian Pekerjaan Umum, Renstra tersebut disusun sebagai rangkuman dari bidang-bidang yang menjadi tugas pokok dan fungsi. Salah satu bidang dalam Kementerian Pekerjaan Umum adalah Cipta Karya, yang melalui Direktorat Jenderalya juga telah menyusun Rencana Strategis kurun waktu 2010 – 2014.

Dalam Renstra Cipta Karya tahun 2010 – 2014 hanya terdapat satu program utama yang akan dilaksanakan yaitu : **"Program Pengembangan Infrastruktur Permukiman"**.

Program ini selanjutnya akan dijabarkan ke dalam 7 kegiatan utama meliputi :

1. Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan dan Penyelenggaraan dalam Pengembangan Permukiman
2. Pengaturan, Pembinaan dan Pengawasan Dalam Penataan Bangunan Dan Lingkungan Termasuk Pengelolaan Gedung Dan Rumah Negara
3. Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, Pengembangan Sumber Pembiayaan Dan Pola Investasi, serta Pengelolaan Pengembangan Infrastruktur Sanitasi dan Persampahan
4. Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, Pengembangan Sumber Pembiayaan dan Pola Investasi, serta Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
5. Dukungan Manajemen Bidang Permukiman
6. Penyusunan Kebijakan, Program dan Anggaran, Kerjasama Luar Negeri, Data Informasi serta Evaluasi Kinerja Infrastruktur Bidang Permukiman
7. Badan Pendukung Pengembangan SPAM

Program dan kegiatan tersebut diharapkan untuk mendukung pencapaian beberapa tujuan utama, yaitu:

1. **Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan infrastruktur PU dan pengendalian pemanfaatan ruang bagi terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan (termasuk adaptasi dan mitigasi perubahan iklim)**

Indikator kinerja utama outcome dari kegiatan ini adalah meningkatnya jumlah kabupaten kota yang menerapkan NSPK bidang Permukiman dalam rangka perencanaan dan pengendalian pemanfaatan ruang bagi terwujudnya pembangunan permukiman yang berkelanjutan.

Indikator kinerja utama output dari kegiatan ini adalah

- a. Jumlah Kabupaten/Kota yang menerbitkan produk pengaturan dan mereplikasi bantek permukiman.
- b. Jumlah Kabupaten/Kota yang menerbitkan produk pengaturan dan mereplikasi bantek bangunan gedung dan lingkungan.

- c. Jumlah kab/kota yang menerbitkan produk pengaturan dan mereplikasikan bantek pengelolaan air limbah dan drainase
- d. Jumlah kab/kota yang menerbitkan produk pengaturan dan mereplikasikan bantek pengelolaan persampahan
- e. Jumlah kab/kota yang menerbitkan produk pengaturan dan mereplikasikan bantek air minum

Penjabaran dalam tiap sektor yang ada dalam Bidang Cipta Karya adalah sebagai berikut :

a) Pengembangan Permukiman

Sasaran :

A. Penyusunan NSPK Bidang Permukiman

- Outcome :
 - Tersusunnya Produk NSPK nasional bidang pengembangan permukiman;
 - Terselenggaranya pendampingan penyusunan NSPK daerah bidang pengembangan permukiman.
- Kegiatan :
 - Penyusunan NSPK nasional bidang pengembangan permukiman
 - Pendampingan penyusunan NSPK daerah bidang pengembangan permukiman
- Output :
 - Jumlah Produk NSPK nasional bidang permukiman
 - Jumlah Produk NSPK daerah bidang permukiman
- Fokus prioritas nasional yang didukung
 - Menyiapkan kebijakan pembangunan perkotaan dan meningkatkan sinkronisasi peraturan perundangan terkait pembangunan perkotaan
 - Menguatkan kapasitas pemerintah kota dalam perencanaan dan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan perkotaan serta penerapan prinsip tata pemerintahan yang baik.

B. Penyusunan Strategi Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan (SPPIK) di daerah

- Outcome : Tersusunnya Strategi Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan (SPPIK) di kab/kota;
- Kegiatan : Pendampingan penyusunan Strategi Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan (SPPIK) di daerah

- Output : Jumlah kab/kota yang memperoleh pendampingan penyusunan Strategi Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan (SPPIK)
 - Fokus prioritas nasional : Memperkuat kapasitas pemerintah kota dalam perencanaan dan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan perkotaan serta penerapan prinsip tata pemerintahan yang baik.
- C. Penyusunan Rencana Pengembangan Kawasan Permukiman (RPKP) di perkotaan dan perdesaan
- Outcome : Tersusunnya Rencana Pengembangan Kawasan Permukiman (RPKP) Perkotaan dan Perdesaan di Kab/Kota yang setara dengan 500 kawasan;
 - Kegiatan : Pendampingan Penyusunan Rencana Pengembangan Kawasan Permukiman (RPKP) Perkotaan dan Perdesaan di daerah yang setara dengan 500 kawasan
 - Output : Jumlah Kab/Kota yang memperoleh pendampingan Penyusunan Rencana Pengembangan Kawasan Permukiman (RPKP) Perkotaan dan Perdesaan yang setara dengan 500 kawasan
 - Fokus prioritas nasional : Memperkuat kapasitas pemerintah kota dalam perencanaan dan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan perkotaan serta penerapan prinsip tata pemerintahan yang baik.
- D. Pendampingan Penyusunan Rencana Tindak Penanganan Kawasan Kumuh di perkotaan
- Outcome : Tersusunnya rencana tindak penanganan kawasan kumuh perkotaan di Kab/Kota;
 - Kegiatan : Pendampingan penyusunan rencana tindak penanganan kawasan permukiman kumuh perkotaan di Kab/Kota
 - Output : Jumlah produk pendampingan penyusunan rencana tindak
 - Fokus prioritas nasional : Memperkuat kapasitas pemerintah kota dalam perencanaan dan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan perkotaan serta penerapan prinsip tata pemerintahan yang baik.
- E. Pembinaan kelembagaan (organisasi dan SDM) serta peningkatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan pengembangan permukiman

- Outcome : Meningkatnya kemampuan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pengembangan permukiman;
- Kegiatan : Penyelenggaraan diseminasi, sosialisasi, diklat, dan lokakarya bagi pemda, masyarakat dan swasta
- Output : Jumlah produk diseminasi, sosialisasi, diklat, dan lokakarya bagi pemda, masyarakat dan swasta
- Fokus prioritas nasional : Memperkuat kelembagaan dan kerjasama antar kota
-

b) Penataan Bangunan dan Lingkungan

Sasaran :

A. Penyusunan NSPK bidang penataan bangunan dan lingkungan

- Outcome : Termanfaatkannya produk pengaturan bidang Penataan Bangunan dan Lingkungan;
- Kegiatan : Penyusunan NSPK bidang Penataan Bangunan dan Lingkungan
- Output : Jumlah NSPK bidang Penataan Bangunan dan Lingkungan
- Fokus prioritas nasional : Memperkuat kapasitas pemerintah kota dalam perencanaan dan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan perkotaan serta penerapan prinsip tata pemerintahan yang baik.

B. Pendampingan penyusunan NSPK bidang penataan bangunan dan lingkungan oleh Pemda

- Outcome :
 - Termanfaatkannya NSPK bidang PBL oleh kab/kota;
 - Termanfaatkannya RTBL sebagai basis perencanaan pada kab/kota
 - Tersusunnya Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran (RISPK)
 - Tersusunnya Rencana Tindak Sistem Ruang Terbuka Hijau (RTH)
 - Tersusunnya Rencana Tindak Pengembangan Kawasan Permukiman Tradisional dan Bersejarah
- Kegiatan :
 - Pendampingan penyusunan NSPK Penataan Bangunan dan Lingkungan di daerah
 - Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan
 - Penyusunan Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran (RISPK)

- Penyusunan Rencana Tindak Sistem Ruang Terbuka Hijau (RTH)
 - Penyusunan Rencana Tindak Pengembangan Kawasan Permukiman Tradisional dan Bersejarah
 - Output :
 - Jumlah Bantek dan pendampingan penyusunan NSPK Penataan Bangunan Gedung dan Lingkungan
 - Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan fasilitasi penyusunan RTBL
 - Jumlah kab/kota yang mendapat fasilitasi penyusunan Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran (RISPK) dan Jumlah kawasan yang mendapat fasilitasi penyusunan rencana tindak penataan dan revitalisasi kawasan
 - Jumlah kab/kota yang mendapat fasilitasi penyusunan Rencana Tindak Sistem Ruang Terbuka Hijau (RTH)
 - Jumlah kab/kota yang mendapat fasilitasi penyusunan Rencana Tindak Pengembangan Kawasan Permukiman Tradisional dan Bersejarah
 - Fokus prioritas nasional yang didukung adalah menguatkan kapasitas pemerintah kota dalam perencanaan dan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan perkotaan serta penerapan prinsip tata pemerintahan yang baik.
- C. Pembinaan Kelembagaan Penataan Bangunan dan Lingkungan (Sosialisasi dan Diklat)
- Outcome : Meningkatnya kualitas Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan bangunan gedung
 - Kegiatan : Fasilitasi penguatan kelembagaan Penataan Bangunan dan Lingkungan, pelatihan (TOT) penyelenggaraan Bangunan Gedung, penataan lingkungan, dan pendataan serta pengelolaan Bangunan Gedung dan Rumah Negara.
 - Output :
 - Jumlah Provinsi yang melaksanakan fasilitasi Penguatan Kelembagaan Penataan Bangunan dan Lingkungan, Pelatihan (TOT), Penyelenggaraan Bangunan Gedung, Penataan Lingkungan dan pendataan serta pengelolaan Gedung dan Rumah Negara, dengan mengundang seluruh Kab/kota
 - Jumlah Provinsi yang melaksanakan Pemeriksaan keandalan bangunan gedung termasuk gedung dan rumah negara dengan mengambil beberapa Kab/Kota terpilih yang ada pada masing-masing wilayahnya.

- D. Fokus prioritas nasional yang didukung adalah menguatkan kapasitas pemerintah kota dalam perencanaan dan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan perkotaan serta penerapan prinsip tata pemerintahan yang baik

c) Pengembangan Sanitasi Lingkungan

Sasaran :

- A. Penyusunan NSPK dalam pengembangan pengelolaan sanitasi lingkungan
- Outcome :
 - Termanfaatkannya produk pengaturan, NSPK pengelolaan air limbah, oleh Pemda
 - Termanfaatkannya produk pengaturan, NSPK pengelolaan drainase, oleh Pemda
 - Kegiatan :
 - Penyusunan NSPK untuk air limbah
 - Penyusunan NSPK untuk drainase
 - Output :
 - Jumlah NSPK untuk pengelolaan air limbah yang tersusun
 - Jumlah NSPK untuk drainase yang tersusun
- B. Pendampingan penyusunan SSK yang berkaitan dengan pengelolaan sanitasi lingkungan oleh Pemda
- Outcome :
 - Termanfaatkannya hasil Bantek, Bintek dan pendampingan oleh Pusat kepada Pemda untuk pengelolaan air limbah
 - Termanfaatkannya hasil Bantek, Bimtek dan pendampingan oleh Pusat kepada Pemda untuk pengelolaan drainase
 - Kegiatan :
 - Bantek, Bintek, dan pendampingan (SSK) pengelolaan air limbah
 - Bantek, bimtek dan pendampingan (SSK) untuk drainase
 - Output :
 - Jumlah Bantek, Bimtek dan pendampingan (SSK) pengelolaan air limbah
 - Jumlah Bantek, Bimtek dan pendampingan (SSK) pengelolaan drainase

- C. Pembinaan Kelembagaan (organisasi, SDM, peran masyarakat) dalam rangka meningkatkan kemampuan pengelolaan sanitasi lingkungan
- Outcome :
 - Meningkatnya kompetensi pengelola sanitasi lingkungan
 - Meningkatnya kinerja pelayanan air limbah
 - Meningkatnya kinerja pelayanan drainase
 - Kegiatan :
 - Menyelenggarakan pelatihan (diklat) teknis dan pengelolaan sanitasi lingkungan
 - Monitoring dan evaluasi kinerja pengembangan air limbah
 - Monitoring dan evaluasi kinerja pengembangan drainase
 - Output :
 - Jumlah penyelenggaraan pelatihan (Diklat) teknis dan pengelolaan air limbah
 - Jumlah penyelenggaraan pelatihan (Diklat) teknis dan pengelolaan drainase
 - Jumlah monev kinerja pengembangan air limbah
 - Jumlah monev kinerja pengembangan drainase

d) Pengembangan Persampahan

Sasaran :

- A. Penyusunan NSPK dalam pengembangan pengelolaan persampahan
- Outcome : Termanfaatkannya produk pengaturan, NSPK, oleh Pemda
 - Kegiatan : Penyusunan NSPK untuk persampahan
 - Output : Jumlah NSPK untuk pengelolaan persampahan yang tersusun
- B. Pendampingan penyusunan SSK yang berkaitan dengan pengelolaan persampahan
- Outcome : Termanfaatkannya hasil Bantek, Bimtek dan pendampingan oleh pusat kepada Pemda untuk pengelolaan persampahan
 - Kegiatan : Bantek, Bimtek dan pendampingan (SSK) untuk persampahan
 - Output : Jumlah Bantek, Bintek, dan pendampingan (SSK) pengelolaan persampahan
- C. Pembinaan Kelembagaan (organisasi, SDM, peran masyarakat) dalam rangka meningkatkan kemampuan pengelolaan persampahan

- Outcome :
 - Meningkatnya kompetensi pengelola persampahan
 - Meningkatnya kinerja pelayanan persampahan
 - Meningkatnya keterlibatan masyarakat dan swasta dalam pengelolaan persampahan
- Kegiatan :
 - Menyelenggarakan pelatihan (Diklat) teknis dan pengelolaan bidang persampahan
 - Monitoring dan evaluasi kinerja pengembangan pengelolaan persampahan
 - Fasilitasi pengembangan sumber pembiayaan dan pola investasi pengembangan persampahan dalam rangka mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang mengadaptasi dan memitigasi perubahan iklim
- Output :
 - Jumlah penyelenggaraan pelatihan (Diklat) teknis dan pengelolaan persampahan
 - Jumlah monev kinerja pengembangan persampahan
 - Jumlah fasilitasi pengembangan sumber pembiayaan dan pola investasi bidang persampahan melalui kerjasama pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat

e) Pengembangan Air Minum

Sasaran :

A. Pengembangan NSPK bidang pengembangan SPAM

- Outcome :
 - Tersusunnya NSPK Air Minum
 - Tersedianya NSPK air minum dalam Peraturan Daerah Kab/Kota
- Kegiatan :
 - Penyusunan rancangan NSPK tentang air minum
 - Bantuan Teknis dan Fasilitasi Penyusunan rancangan Perda terkait air minum
- Output :
 - Jumlah NSPK tentang air minum yang tersusun
 - Jumlah kab/kota yang menyelenggarakan pengembangan SPAM sesuai NSPK

B. Pendampingan Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum kabupaten/kota

- Outcome : Tersedianya Rencana Induk SPAM kabupaten/kota
- Kegiatan : Pendampingan penyusunan Rencana Induk SPAM

- Output : Jumlah Rencana Induk SPAM yang telah ditetapkan
- C. Peningkatan kapasitas kelembagaan termasuk Sumber Daya Manusia dalam pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
 - Outcome :
 - Adanya dukungan penuh stakeholder di kab/kota dalam pengembangan SPAM
 - Meningkatnya PDAM yang sehat
 - Termanfaatkannya pengelola air minum non-PDAM yang mendapatkan manfaat pembinaan
 - Meningkatnya kinerja pelayanan air minum
 - Kegiatan : Pendampingan penyusunan Rencana Induk SPAM
 - Pembinaan kepada para pemegang keputusan dan penyelenggara air minum di daerah dalam pengembangan Air Minum
 - Pendidikan dan Pelatihan penyelenggaraan sistem penyediaan air minum
 - Bantuan teknis dan manajemen pengelola air minum (PDAM)
 - Bantuan teknis pengelolaan untuk pengelola air minum non-PDAM
 - Monitoring dan evaluasi kinerja pengembangan pengelolaan air minum
 - Output : Jumlah Rencana Induk SPAM yang telah ditetapkan
 - Jumlah penyelenggara air minum yang mendapatkan pembinaan, pendidikan, dan pelatihan
 - Jumlah PDAM yang memperoleh pembinaan
 - Jumlah pengelola air minum non-PDAM yang memperoleh pembinaan
 - Jumlah Monev kinerja pengembangan pengelolaan air minum
 - Pembinaan dan pendampingan dalam rangka pembiayaan
 - Outcome :
 - Tersedianya pra studi kelayakan KPS
 - Terfasilitasinya PDAM yang melakukan investasi dari pinjaman bank
 - Tersedianya alternatif pembiayaan untuk pengembangan SPAM
 - Kegiatan :
 - Penyusunan pra studi kelayakan KPS
 - Fasilitasi Kredit Perbankan dalam penyediaan air minum
 - Kajian pola pembiayaan
 - Output :

- Jumlah laporan pra studi kelayakan KPS
 - Jumlah PDAM terfasilitasi untuk mendapatkan pinjaman bank
 - Jumlah studi alternatif pembiayaan
- D. Adaptasi perubahan iklim
- Outcome :
 - Terlaksananya kampanye hemat air dan perlindungan sumber air baku air minum di perdesaan dan perkotaan
 - Ketersediaan air baku air minum alternatif
 - Kegiatan :
 - Edukasi/kampanye hemat air dan perlindungan sumber air baku air minum
 - Percontohan reuse dan daur ulang air limbah
 - Output :
 - Jumlah propinsi yang melaksanakan kampanye
 - Jumlah aktivitas reuse dan daur ulang air

2. Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman dan cakupan pelayanan (dasar) bidang Pekerjaan Umum untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat

Indikator kinerja utama outcome dari kegiatan ini adalah meningkatnya jumlah kawasan yang mendapat akses pelayanan infrastruktur bidang permukiman.

Indikator kinerja utama output dari kegiatan ini adalah :

- a. Jumlah kawasan yang tertangani infrastruktur permukiman.
- b. Jumlah kawasan yang terlayani penataan bangunan gedung dan lingkungannya
- c. Jumlah kawasan yang mendapat akses prasarana air limbah
- d. Jumlah kawasan genangan yang terlayani pelayanan drainase
- e. Jumlah kawasan TPA yang meningkat kinerjanya
- f. Jumlah kawasan yang mendapat pelayanan air minum pada penduduk kota/kabupaten

Penjabaran dalam tiap sekto yang ada dalam Bidang Cipta Karya adalah sebagai berikut :

a) Pengembangan Permukiman

Sasaran :

- A. Pengembangan Permukiman Perkotaan
 - 1) Penataan kawasan permukiman kumuh di perkotaan

- Outcome :
 - Berkurangnya kawasan-kawasan kumuh di perkotaan setara 534 Ha atau 414 Ha
 - Tersedianya hunian vertikal di kawasan-kawasan kumuh berat di perkotaan
 - Kegiatan :
 - Penyediaan infrastruktur permukiman di kawasan-kawasan kumuh perkotaan
 - Pembangunan Rusunawa dan infrastruktur pendukungnya
 - Output :
 - Jumlah kawasan kumuh di perkotaan setara 534 Ha, atau 414 Ha yang tertangani
 - Jumlah satuan unit hunian Rumah Susun yang terbangun dan infrastruktur pendukungnya
- 2) Pembangunan infrastruktur kawasan-kawasan permukiman baru
- Outcome : Terwujudnya kawasan-kawasan permukiman bagi MBR
 - Kegiatan : Penyediaan Infrastruktur permukiman di kawasan-kawasan perumahan bagi MBR
 - Output : Jumlah kawasan perumahan bagi MBR

b) Penataan Bangunan dan Lingkungan

Sasaran :

A. Penataan tertib pembangunan dan keselamatan bangunan dan lingkungan

- Outcome :
 - Terpeliharanya gedung negara yang bersejarah
 - Meningkatnya jumlah kab/kota yang mendapat manfaat pengembangan sarana dan prasarana pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran
 - Meningkatnya jumlah bangunan gedung yang memenuhi persyaratan kelengkapan aksesibilitas pada bangunan gedung
- Kegiatan :
 - Pengembangan bangunan gedung negara dan bersejarah
 - Percontohan pengembangan sarana dan prasarana pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran
 - Percontohan pengembangan sarana dan prasarana aksesibilitas pada bangunan gedung

- Output :
 - Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan pengembangan bangunan gedung negara dan bersejarah
 - Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan pengembangan sarana dan prasarana pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran
 - Jumlah Kab/Kota yang mendapat dukungan pengembangan sarana dan prasarana aksesibilitas bangunan gedung
- B. Penataan bangunan pada kawasan strategis, tradisional, bersejarah, dan ruang terbuka hijau.
 - Outcome :
 - Meningkatnya jumlah kawasan yang meningkat kualitasnya yang setara dengan 7.380 Ha
 - Meningkatnya kualitas ruang terbuka hijau pada lingkungan permukiman yang setara dengan 369 Ha
 - Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman tradisional dan bersejarah yang setara dengan 442 Ha
 - Kegiatan :
 - Pengembangan sarana dan prasarana pada kawasan yang mengalami degradasi fungsi dan penurunan kualitas fisik lingkungan (revitalisasi)
 - Pengembangan sarana dan prasarana Ruang Terbuka Hijau
 - Pengembangan sarana dan prasarana kawasan permukiman tradisional dan bersejarah
 - Output :
 - Jumlah Kawasan setara 7.380 Ha yang mendapatkan dukungan sarana dan prasarana pada kawasan yang direvitalisasi
 - Jumlah Kawasan setara 369 Ha yang mendapatkan dukungan sarana dan prasarana Ruang terbuka Hijau
 - Jumlah kawasan setara 442 Ha yang mendapatkan dukungan sarana dan prasarana pada pemukiman tradisional dan bersejarah
- C. Pengembangan PIP2B yang memenuhi standar bangunan gedung.
 - Outcome : Termanfaatkannya PIP2B untuk melayani masyarakat

- Kegiatan : Pembangunan dan peningkatan Pusat Informasi Pengembangan Permukiman dan Bangunan (PIP2B)
 - Output : Jumlah Provinsi yang mendapat pengembangan PIP2B
- D. Pemberdayaan masyarakat mandiri dan sejahtera.
- Outcome : Termanfaatkannya kelurahan/desa dalam pendampingan pemberdayaan masyarakat PNPM-P2KP
 - Kegiatan : Bantek, Bimtek serta pendampingan pemberdayaan masyarakat PNPM-P2KP
 - Output : Jumlah Kelurahan/Desa yang mendapatkan pendampingan pemberdayaan sosial (P2KP/PNPM)

c) Pengembangan Sanitasi Lingkungan

A. Peningkatan pelayanan infrastruktur air limbah

- Outcome :
 - Terlayannya kawasan untuk infrastruktur air limbah dengan sistem off-site
 - Terlayannya kawasan untuk infrastruktur air limbah dengan sistem on-site
- Kegiatan :
 - Pengembangan infrastruktur air limbah dengan sistem off-site
 - Pengembangan infrastruktur air limbah dengan sistem on-site
- Output :
 - Jumlah kawasan yang terlayani infrastruktur air limbah dengan sistem off-site
 - Jumlah kawasan yang terlayani infrastruktur air limbah dengan sistem on-site

B. Peningkatan pelayanan infrastruktur drainase.

- Outcome : Berkurangnya jumlah genangan
- Kegiatan : Pengembangan infrastruktur drainase
- Output : Berkurangnya jumlah luas genangan

d) Pengembangan Persampahan

Peningkatan pelayanan infrastruktur air limbah

- Outcome : Terlayannya kawasan untuk infrastruktur persampahan

- Kegiatan :
 - Penyediaan infrastruktur persampahan
 - Fasilitasi pengelolaan persampahan
 - Fasilitasi pengurangan sampah
- Output :
 - Jumlah kawasan yang telayani infrastruktur persampahan
 - Jumlah prasarana pengumpulan sampah
 - Jumlah prasarana persampahan terpadu 3R

e) Pengembangan Air Minum

Peningkatan pelayanan air minum terhadap MBR Perkotaan

- Outcome :
 - Terfasilitasinya kawasan yang telayani air minum perpipaan di perkotaan
 - Terfasilitasinya kapasitas produksi air minum terpasang
- Kegiatan :
 - Fasilitasi pengembangan PS air minum MBR Perkotaan
 - Fasilitasi pengembangan PS air minum perkotaan/IKK
- Output :
 - Jumlah kawasan yang terfasilitasi (PS air minum MBR Perkotaan)
 - Jumlah IKK yang terfasilitasi
- Peningkatan pelayanan air minum terhadap MBR Perdesaan
- Outcome :
 - Terfasilitasinya desa yang telayani air minum perpipaan di perdesaan
 - Terfasilitasinya kawasan dalam kapasitas produksi air minum terpasang
 - Terfasilitasinya kawasan dalam kapasitas produksi air minum terpasang
- Kegiatan :
 - Fasilitasi pengembangan PS air minum perdesaan
 - Kapasitas produksi air minum terpasang khusus untuk menangani kawasan pemekaran, pulau terluar, perbatasan, terpencil, KAPET
 - Kapasitas produksi air minum terpasang khusus untuk mendukung pelabuhan perikanan
- Output :
 - Jumlah desa yang terfasilitasi (PS air minum perdesaan)

- Jumlah kawasan (It/det) yang terfasilitasi (kawasan pemekaran, pulau terluar, perbatasan, terpencil, KAPET)
- Jumlah kawasan (It/det) yang terfasilitasi (mendukung pelabuhan perikanan)

3. Meningkatkan pembangunan kawasan strategis, wilayah tertinggal dan penanganan kawasan rawan bencana untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah.

a) Pengembangan Permukiman

A. Pengembangan Permukiman Perkotaan

Penanganan kawasan permukiman di kawasan rawan bencana (Sumatera Barat, dll)

- Outcome : Tertanganinya kawasan-kawasan permukiman pasca bencana (Sumatera Barat, dll)
- Kegiatan : Penyediaan Infrastruktur permukiman pada kawasan rawan bencana (Sumatera Barat, dll)
- Output : Jumlah kawasan permukiman rawan bencana (Sumatera Barat, dll)

B. Pengembangan Permukiman Perdesaan

Pengembangan kawasan-kawasan potensial di perdesaan

- Outcome :
 - Tertanganinya kawasan-kawasan pusat pertumbuhan di perdesaan termasuk agropolitan setara 600 Ha
 - Terbangunnya infrastuktur sosial ekonomi wilayah
- Kegiatan :
 - Penyediaan Infrastruktur permukiman di kawasan perdesaan potensial / agropolitan
 - Pembangunan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah
- Output :
 - Jumlah kawasan perdesaan potensial / agropolitan setara 600 Ha yang tertangani
 - Jumlah kawasan yang dilayani oleh infrastruktur pendukung kegiatan ekonomi dan sosial

C. Penataan kawasan di daerah tertinggal, perbatasan, dan pulau kecil terluar

- Outcome :

- Meningkatnya kualitas lingkungan hunian untuk masyarakat yang tinggal di P. Kecil, Desa Tertinggal dan terpencil
- Meningkatnya kualitas lingkungan hunian untuk masyarakat yang tinggal di kawasan perbatasan dan pulau kecil terluar yang setara dengan 500 Ha
- Kegiatan :
 - Pembangunan Prasarana dan Sarana Permukiman di Desa Tertinggal
 - Pembangunan Prasarana dan Sarana Permukiman di Kawasan Perbatasan dan pulau kecil terluar
- Output :
 - Jumlah Desa Tertinggal yang terbangun prasarana dan sarana lingkungan permukiman setara 500 Ha yang terbangun prasarana dan sarana lingkungan permukiman.